

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi peraturan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan apa akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/puu-vii/2009 dalam kaitannya Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pencabutan hak politik terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VI/2009 tentang persyaratan bagi mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diputus dengan putusan pidana tambahan pencabutan hak politik oleh hakim dengan ketentuan pencabutan hak politik maksimal lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan”. Adanya perbedaan terkait kapan berlakunya pencabutan hak politik yang termuat dalam kedua peraturan tersebut menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan kapan berlakunya pencabutan hak tersebut. Hasil dari penelitian yaitu harmonisasi pengaturan pidana tambahan pencabutan hak politik antara Pasal 38 KUHP ayat (2) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan terkait kapan berlakunya pencabutan hak politik, sehingga mengakibatkan disharmonisasi terhadap kedua peraturan tersebut dan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan mengenai pencabutan hak tertentu dan kapan berlakunya, yang dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki jabatan dalam pemerintahan . Oleh sebab itu, pembuat undang-undang yang menjalankan kebijakan formatif agar menambahkan ketentuan mengenai kriteria, batas waktu pencabutan hak, dan kapan berlakunya pencabutan hak tersebut. Hal ini di dasarkan pada *asas lex specialis derogat legi generalis*. Dari uraian diatas penulis merekomendasikan untuk memperjelas pengaturan terkait pencabutan hak tertentu, terutama Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pencabutan hak-hak tertentu khususnya pencabutan hak politik koruptor untuk menjabat dalam jabatan publik.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik.

ABSTRACT

*This study aims to find out how the harmonization of additional criminal regulations for the revocation of political rights in article 38 of the criminal law code and the decision of the constitutional court number 4/PUU-VII/2009 and what are the legal consequences of the decision of the constitutional court number 4/puu-vii/2009 in relation to article 18 of the law on eradicating corruption related to the revocation of the political rights of convicts of corruption. The issues to be investigated are the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VI/2009 regarding the requirements for ex-convicts to run for regional heads or deputy regional heads who are decided by an additional criminal decision on revocation of political rights by judges with the provisions of revocation of political rights a maximum of five years after serving the principal sentence. Article 38 paragraph (2) of the Criminal Code states that "the revocation of rights takes effect on the day the judge's decision can be carried out". There are differences regarding when the revocation of political rights contained in the two regulations takes effect has legal consequences. Meanwhile, Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not specify when the revocation of rights will take effect. The results of the study are the harmonization of additional criminal arrangements for the revocation of political rights between Article 38 of the Criminal Code paragraph (2) and the decision of the constitutional court, there are differences regarding when the revocation of political rights takes effect, resulting in disharmony of the two regulations and legal uncertainty as regulated in Article 18 of the Law. -The Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption does not explain the revocation of certain rights and when it takes effect, which in this case applies to perpetrators of corruption who have positions in government. Therefore, legislators who carry out formulative policies should add provisions regarding criteria, deadline for revocation of rights, and when the revocation of rights takes effect. It is based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*. From the description above, the author recommends clarifying the regulations regarding the revocation of certain rights, especially the Law on the Eradication of Corruption Crimes regarding the revocation of certain rights, especially the revocation of the political rights of corruptors to serve in public office.*

Keywords: *Harmonization of Law, Corruption Crime, Revocation of Political Rights.*